

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad Ghufron,SH. dan Drs. Sudarsono, SH. , 1991, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta
- Angger Sigit Pramukti, Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Bagus Sarnawa, Hayu Sukiyoprapti, 2007, *Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Lab Hukum.
- Desi Fernanda, 2003, *Etika Organisasi Pemerintah*, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia.
- Ellydar Chaidir, 2008, *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta, Total Media, hlm. 294.
- Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta, Grasindo
- Husni, L. (2005). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta, PT Raja Grasindo.
- Janedri M Gaffar, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta, Kontpress.
- Miftah Thoha, 2008, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, Jakarta, Kencana PrenadaMedia Group.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum, Yogyakarta*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Marzuki, J.B.J.M Ten Berge, P.J.J. Van Buuren, F.A.M. Stroink, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Racmahwati, Ike Kusdyah, 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Andi, Yogyakarta
- Rozali Abdullah, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- S.F. Marbun dan Mahfud M. D., *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1987.
- S.F. Marbun, 1998, *Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai Negeri Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Septi Nurwijayanti, 2009, *Politik Ketatanegaraan*, Yogyakarta, Lab Hukum.

Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, Tedi Sudrajat, 2014, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Tedi Sudrajat, 2017, *Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan & Jabatan*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.

Yos Johan Utama, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Banten, Univeristas Terbuka.

W.J.S Poerwadarminta, 1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Jurnal:

Alizar Isna, "Netralitas Birokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegilaan*, Volume 23, Nomor 2, Agustus 2010

Bagus Sarnawa, "Pengaturan dan Implementasi Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara di Indonesia." *Jurnal Media Hukum*, Volume 24, Nomor 1, Juni 2017

Janpatar Simamora, "Eksistensi Pemilukada dalam rangka mewujudkan Pemerintah Daerah yang Demokratis", *Jurnal Hukum*, Volume 23, Nomor 1, Februari 2011.

Mat Zudi, Arief Hidayat, Untung Sri Hardjanto, "Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah", *Diponegoro Law Jurnal*, Volume I, Nomor 4, Tahun 2012

Rina Martini, "Netralitas Birokrasi dalam Pilgub Jateng 2013". *Jurnal Ilmu Sosial*. Volume. 14. Nomor 1. Juli 2015

Rina Martini. "Politisasi Birokrasi di Indonesia", *Jurnal Ilmu Politik*, Volume. 1. Nomor 1, Magister Ilmu Politik, April 2010.

Septi Nur Wijayanti, "Keterlibatan Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Konstitusi*, Volume. II, Nomor 1, September 2013.

Sri Hartini, "Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)". *Jurnal Dinamika Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Volume. 9 Nomor3, September 2009

Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat. "Kebijakan Netralitas Politik Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilukada (Studi di Jawa Tengah)", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2014

Tatang Sudrajat, "Netralitas PNS dan Masa Depan Demokrasi dalam Pilkada Serentak 2015", *Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume XII. Nomor 3, Desember 2015

Internet:

- Badan Pusat Statistik, “Statistik Politik 2017”,
<https://www.bps.go.id/publication/2017/12/22/da332e4125b26eb9dd0870ce/statistik-politik-2017.html>
- Dispen, “Netralitas PNS dalam Pilkada”,
<http://dispenmaterikuliah.blogspot.co.id/2011/07/netralitas-pns-dalam-pilkada.html>, diakses pada tanggal 17 April 2018 20.55 WIB.
- GlosarId, “Arti Netralitas PNS”,
<https://glosar.id/index.php/term/pengetahuan.80151-netralitas-pns-adalah.xhtml>, diakses pada tanggal 19 April 2018 pukul 11.07 WIB.
- J. Tjiptabudy, Fungsi dan Peran Panitia Pengawas Pemilu dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, <http://fhukum.unpatti.ac.id/htnhan/112-fungsi-dan-peran-panwaslu-dalam-sistem-pemilihan-umum-di-indonesia-kajian-dari-aspek-yuridis>, diakses pada tanggal 19 April 2018 pukul 16.33 WIB
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, “Profil KPU”,
<http://kpukabkp.blogspot.co.id/p/tugas-dan-kewenangan-dalam-pasal10.html>, diakses pada tanggal 20 April 2018 pukul 09.27 WIB..
- Rusliandy, “Netralitas Pegawai Negeri Sipil”,
<http://rusliandy.blogspot.co.id/2009/06/netralitas-pegawai-negeri-sipil.html>, diakses pada tanggal 21 April 2018 pukul 20.21 WIB.
- Srikandi Rahayu, “Pengertian Pilkada atau Pemilukada”,
<http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-pilkada-atau-pemilukada.html>, diakses pada tanggal 23 April 2018 pukul 15.26 WIB.
- Wikipedia, “Kepala Daerah”, https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_daerah, diakses pada tanggal 2 April 2017 pukul 22.23 WIB.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Partai Politik.

Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2000;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : SE/06/ M.PAN-RB/11/2016 tentang Pelaksanaan Netralitas dan Penegakan Disiplin serta Sanksi Bagi Aparatur Sipil Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara Serentak Tahun 2017